



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Di Bab II ini penulis akan menjabarkan dan menjelaskan tinjauan pustaka yang berisi tentang teori-teori yang akan penulis gunakan sebagai panduan dalam mengerjakan penelitian ini. Teori-teori yang penulis gunakan berasal dari berbagai Buku, Jurnal maupun Artikel. Sehubungan dengan permasalahan yang timbul yang telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya.

Dalam Bab II, peneliti akan menjabarkan Teori yang penulis jabarkan dalam tinjauan pustaka ini diantaranya adalah penelitian, pengertian dan pemahaman mengenai interaksi simbolik serta pemahaman mengenai Penerapan Standar Akutansi Keuangan di Koperasi. Selain menjelaskan tentang tinjauan pustaka sehubungan dengan penelitian penulis lakukan, penulis juga turut menjelaskan mengenai kerangka berpikir yang menjadi dasar dan arahan bagi penulis untuk melakukan penelitian sehingga penelitian ini mendapat arahan dengan baik dan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Penulis akan mengemukakan teori-teori sehubungan dengan masalah yang akan dibahas. Adapun maksud dari teori-teori tersebut sebagai pedoman dalam melakukan penelitian. Definisi atau pengertian akutansi yang berasal dari berbagai Lembaga dan dari berbagai sudut pandang yang berbeda.

A. Landasan Teori

1. Koperasi

a. Definisi Koperasi

Dr. Muhammad Hatta mengemukakan bahwa koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Mereka didorong oleh keinginan memberi jasa pada kawan “seorang buat semua dan semua buat seorang” inilah yang dinamakan Auto Aktivitas Golongan, terdiri atas solidaritas, individualitas, menolong diri sendiri, dan Jujur.



Menurut Undang-Undang No.12 tahun 1967 koperasi yaitu organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama, berdasarkan asas kekeluargaan.

Menurut Undang-Undang No.25 Tahun 1992 yang terdapat pada (pasal) yang dimaksud dengan Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang, seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai Gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, koperasi yaitu badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Namun Menurut Dewan Perwakilan Rakyat (diakses melalui <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/783>) Peraturan Undang- Undang tentang koperasi pasal UU No.17/2012 tersebut dibatalkan karena tidak mendapat persetujuan MK sehingga Kembali seperti pasal sebelumnya yaitu **UU No.25 Tahun 1992** dimana Peraturan Undang-Undang tentang koperasi sampai saat ini masih berlaku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Landasan Hukum dan Asas Koperasi

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Landasan dan Asas Koperasi Menurut UU No.25 Tahun 1992 yang terdapat pada (pasal 2) Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta atas asas kekeluargaan. Dalam (Pasal 3) Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan Makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

c Tujuan, Fungsi dan Peran Koperasi

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Fungsi dan Peran Koperasi Menurut UU No.25 Tahun 1992 yang terdapat dalam (pasal4) :

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- 2) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- 3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- 4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

c Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

d Nilai dan Prinsip Koperasi

Nilai-nilai yang terdapat pada Koperasi adalah nilai kekeluargaan, mandiri, demokrasi, kebersamaan, serta peduli dengan sesama anggota.

Adapun Prinsip Koperasi Menurut UU No.25 Tahun 1992 dalam (pasal 5)

Koperasi Melaksanakan Prinsip Koperasi Sebagai Berikut :

- 1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
- 2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis;
- 3) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
- 4) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
- 5) Kemandirian.

Dalam mengembangkan Koperasi, maka Koperasi melaksanakan pula prinsip Koperasi sebagai berikut:

- 1) Pendidikan perkoperasian;
- 2) Kerja sama antarkoperasi.

e Jenis Koperasi

Adapun Bentuk dan Jenis Koperasi terdapat pada Pasal 16 UU No 25 tahun 1992 menjelaskan bahwa jenis koperasi didasarkan pada kesamaan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Berikut jenis-jenisnya :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- 1) Koperasi Konsumen
- 2) Koperasi Produsen
- 3) Koperasi Simpan Pinjam
- 4) Koperasi Pemasaran
- 5) Koperasi Jasa

2. Standar Laporan Keuangan

Untuk mengetahui laporan keuangan, seorang analis harus terlebih dahulu mempunyai pemahaman yang mendalam mengenai bentuk atau prinsip dalam penyajian laporan keuangan serta masalah-masalah yang timbul dalam laporan keuangan tersebut. Penyajian Laporan Keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang berisikan informasi mengenai kondisi keuangan sebuah perusahaan, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai laporan keuangan.

Menurut Fahmi (2012:2) Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut. Menurut Kieso (2011: 5) Mendefenisikan laporan keuangan sebagai sarana pengkomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak-pihak dari luar perusahaan. Dari pengertian tersebut Laporan Keuangan dapat diartikan informasi yang diperoleh dari proses akuntansi yang memiliki peran besar dalam mempengaruhi keputusan-keputusan mengenai perusahaan.

Tujuan Laporan Keuangan menurut Kasmir (2012: 10) menyatakan secara umum laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



baik pada saat tertentu maupun pada periode tertentu. Laporan keuangan juga dapat disusun secara mendadak sesuai dengan kebutuhan perusahaan maupun secara berkala. IAI (2009:2) juga menjelaskan bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (stewardship) atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Menurut IAI dalam SAK ETAP 2.1 (2016) Tujuan dari laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengamnilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu.

Adapun Karakteristik Keuangan Koperasi sangat terkait dengan bentuk laporan keuangan pada Koperasi, terutama dalam laporan laba rugi dan neraca yang menjadi mendasar dalam perhitungan kinerja laporan keuangan koperasi (Hendra, 2010).

Karakteristik Laporan Keuangan koperasi secara umum adalah :

1. Pengurus bertanggung jawab dan wajib melaporkan kepada rapat anggota segala sesuatu yang menyangkut tata kehidupan koperasi
2. Laporan keuangan koperasi merupakan bagian dari system pelaporan keuangan koperasi
3. Kepentingan utama dari pelaporan keuangan koperasi untuk menilai pertanggung jawaban setiap pengurus, prestasi atau kinerja pengurus, manfaat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Militer IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kepada anggota merupakan bahan pertimbangan untuk menentukan sumber daya yang diberikan koperasi

4. Modal koperasi terdiri pengumpulan simpanan dan penyisihan dari hasil usaha termasuk cadangan serta sumber lainnya
5. Pendapatan Koperasi diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi penyusutan dan biaya dari buku yang bersangkutan disebut hasil usaha.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) merupakan pilar kedua standar akuntansi keuangan Indonesia setelah SAK umum berbasis IFRS. SAK ETAP diperuntukan bagi entitas tanpa akuntabilitas publik sebagaimana telah dijelaskan dalam ruang lingkup SAK ETAP, termasuk Koperasi & UMKM.

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) mengatur dalam hal pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi pada laporan keuangan. SAK ETAP berlaku efektif pada laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011, dan penerapan dini diperkenankan. Penyederhanaan pengaturan akuntansi pada SAK ETAP diharapkan dapat mendorong perkembangan UMKM di Indonesia.

a. Ruang Lingkup SAK ETAP

Menurut IAI dalam SAK ETAP 1.1 (2016) Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang :

- (1) Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan;
- (2) Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purposes financial statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yang terlihat langsung dalam pengelolaan usaha, dan Lembaga pemeringkat kredit.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Menurut IAI dalam SAK ETAP 1.2 (2016) Entitas akuntabilitas publik signifikan jika:

- (1) Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran , atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran , pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal; atau
- (2) Entitas menguasai asset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masalah ,seperti bank ,entitas asuransi ,pialang dan atau pedagang efek,dana pension reksa dana dana bank investasi .

Menurut IAI dalam SAK ETAP 1.3 (2016) Entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi mengizinkan pengguna SAK ETAP.

Pada paragraph 30.1 tertuang tanggal efektif SAK ETAP diterapkan untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 januari 2011.

b Karakteristik Kualitatif Informasi dalam Laporan Keuangan

Menurut IAI dalam SAK ETAP bab 2 (2016) Karakteristik Kualitatif Informasi dalam Laporan Keuangan terdiri dari :

- (1) Dapat dipahami
- (2) Relevan
- (3) Materialitas
- (4) Keandalan
- (5) Subtansi Bentuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (6) Pertimbangan sehat
- (7) Kelengkapan
- (8) Dapat dibandingkan
- (9) Tepat waktu
- (10) Keseimbangan biaya dan manfaat

c. Laporan Keuangan Lengkap Menurut SAK ETAP

Menurut IAI dalam SAK ETAP bab 3.12 (2016) Laporan Keuangan Entitas

meliputi :

- 1) Neraca
- 2) Laporan Laba Rugi
- 3) Laporan ekuitas yang juga menunjukkan :
 - i. Seluruh perubahan dalam ekuitas, atau
 - ii. Perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik;
- 4) Laporan arus kas; dan
- 5) Catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

(1) Neraca

Neraca menyajikan berupa asset, kewajiban , dan akuitas suatu entitas pada suatu tanggal tertentu - akhir periode pelaporan. Neraca menimal mencakup pos – pos sebagai berikut :

- a. Kas dan setara kas
- b. Piutang usaha dan piutang lainnya
- c. Persediaan
- d. Properti / investasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- e. Aset tetap
- f. Aset tidak berwujud
- g. Hutang usaha dan Hutang lainnya
- h. Asset dan kewajiban pajak
- i. Kewajiban destimasi
- j. Ekuitas

Dalam SAK ETAP tidak menentukan format atau urutan terhadap pos-pos yang disajikan.

(2) Laporan Laba Rugi

Dalam laporan laba rugi memasukkan semua pos penghasilan dan beban yang terjadi atau diakui dalam suatu periode kecuali SAK ETAP mensyaratkan lain. Laporan laba rugi mencakup pos-pos sebagai berikut :

- a. Pendapatan
- b. Beban keuangan
- c. Bagian laba atau rugi dari investasi
- d. Beban pajak
- e. Laba rugi bersih

Dalam laporan laba rugi Entitas tidak boleh menyajikan pos pendapatan dan beban sebagai pos luar biasa .

(3) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan laba atau rugi entitas untuk pos suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(4) Laporan Arus Kas

Untuk laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi dalam satu periode dari aktivitas operasi, inventasi dan pendanaan.

(5) Catatan Atas Laporan Keuangan

Adapun catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. Berikut Catatan atas laporan keuangan harus :

- i. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu yang digunakan sesuai dengan paragraph 8.5 dan 8.6;
- ii. Mengungkapkan informasi yang disajikan dalam SAK ETAP tetapi tidak disajikan dalam laporan keuangan; dan
- iii. Memberikan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan ,tetapi relevan untuk memahami laporan keuangan .

Urutan penyajian catatan atas keuangan adalah :

- (1) Suatu Pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK ETAP (paragraf 3.3)
- (2) Ringkasan kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan (8.5);
- (3) Informasi yang mendukung pos-pos laporan keuangan, sesuai dengan urutan penyajian setiap komponen laporan keuangan dan urutan penyajian pos-pos tersebut.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4. Kinerja Keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Standar Akuntansi Keuangan yang terdapat (di bab 2.20)

Kinerja keuangan adalah hubungan antara penghasilan dan beban dari entitas sebagaimana disajikan dalam laporan laba rugi, laba sering digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar untuk pengukuran lain, seperti tingkat pengembalian investasi atau laba persaham. Unsur-unsur laporan keuangan yang secara langsung terkait dengan pengukuran laba adalah penghasilan dan beban, Penghasilan dan beban di definisikan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Penghasilan (income) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus masuk atau peningkatan asset, atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.
2. Beban (Expenses) adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode pelaporan dalam bentuk arus keluar atau penurunan asset ,atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak terkait dengan distribusi kepada penanaman modal.

Adapun kriteria pengakuan penghasilan dan beban dibahas lanjut di dalam paragraf 2.22 dan 2.23;

1. Sumber dan jenis Pendapatan
 - a. Pendapatan / penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti :
 - Penjualan
 - Imbalan
 - Bunga deviden
 - Royalty & sewa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Keuntungan mencerminkan pos lainnya yang memenuhi definisi penghasilan namun bukan pendapatan. Ketika keuntungan diakui dalam laporan laba rugi, biasanya disajikan secara terpisah karena pengetahuan mengenai pos tersebut berguna untuk tujuan pengambilan keputusan ekonomi.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Beban

Beban adalah biaya langsung maupun tidak langsung yang telah habis waktunya pada periode keuangan tertentu dari arus barang atau jasa kepasar maupun operasi yang terkait lainnya,

Menurut Soemarso (2013:226) beban dapat dikelompokkan menjadi :

1. Beban Penjualan (*Selling Expenses*)
2. Beban Administrasi dan Umum (*General and administrative expenses*)

Beban yang bersifat umum dalam perusahaan.

3. Beban lain-lain (*Other Expenses*)

5. Pengukuran

Pengukuran merupakan proses penetapan jumlah uang yang digunakan entitas untuk mengukur asset, kewajiban, penghasilan dan beban dalam laporan keuangan.

Proses ini termasuk pemilihan dasar pengukuran tertentu (Paragraf 2.30).

Dasar pengukuran yang umum adalah biaya historis dan nilai wajar (Paragraf 2.31)

1) Biaya historis adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar perolehan. Kewajiban dicatat sebesar kas atau setara kas yang diterima atau sebesar nilai wajar dari asset non-kas yang diterima sebagai penukar kewajiban pada saat terjadinya kewajiban.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2) Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu asset, atau untuk menyelesaikan suatu kewajiban, antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

a) Pendapatan

Dalam Paragraf 20.3 Entitas mengukur pendapatan berdasarkan nilai wajar atas pembayaran yang diterima atau masih harus diterima. Nilai wajar tersebut tidak termasuk jumlah diskon penjualan dan potongan volume.

Lima dasar pengukuran pendapatan menurut pernyataan konsep keuangan (SFAC) No.5 adalah :

- (1) Harga pertukaran masa lalu (*history cost*) yang digunakan sebagai dasar pengukuran dari harga perolehan suatu aktiva seperti adanya pembelian aktiva tetap dan persediaan
- (2) Biaya Pengganti masa sekarang (*current replacement*) harga yang dibayarkan saat membeli penggantian aktiva baru yang sejenis, seperti penurunan nilai awal yang diperoleh dalam suatu persediaan.
- (3) Nilai pasar (*current market value*) harga jual aktiva berdasarkan suatu persediaan.
- (4) Nilai bersih yang dapat direalisasi (*net realizable value*) dimana jumlah kas yang akan diperoleh hasil dari konversi atau penukaran suatu aktiva ,seperti niali piutang yang kemungkinan bisa ditagih.
- (5) Nilai sekarang atau nilai yang didiskonto (*Present discounted value*) adanya nilai arus kas yang keluar bersih untuk masa yang akan datang ke nilai yang ada sekarang dengan tingkat suku bunga tertentu.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b) Beban

© Dalam Paragraf 21.1 pengukuran beban dalam akuntansi adalah entitas mengukur beban berdasarkan biaya pinjaman yang mencakup bunga untuk cerukan bank dan pinjaman jangka pendek dan Panjang, amortisasi biaya tambahan yang timbul sehubungan dengan proses perjanjian peminjam.

Hak Cipta: Dilindungi Undang-Undang

6. Pencatatan

Pencatatan Akuntansi Koperasi didasarkan pada Standar Keuangan Umum (SAK-Umum) dan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) yang dimodifikasi sesuai dengan tujuan dan karakteristik transaksi usaha simpan pinjam pada pedoman ini bersifat konvensional.

Pencatatan setiap transaksi dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai, norma, dan prinsip koperasi. Adapun Pencatatan kas masuk dilakukan pada saat penerimaan sedangkan Pencatatan kas keluar dilakukan pada saat terjadi pengeluaran. Dan untuk pencatatan saldo kas disesuaikan dengan fisik kas sesuai tanggal laporan. Menurut SAK ETAP metode pencatatan transaksi pendapatan dan beban menggunakan metode *accrual basic*, sedangkan pencatatan yang disajikan oleh koperasi mitra teladan terhadap pendapatan dan beban menggunakan *cash basis*.

Pencatatan Pendapatan merupakan pencatatan seluruh jumlah pendapatan kedalam sistem akuntansi sehingga jumlah tersebut tergambar dalam sistem keuangan. Berdasarkan jenis dan usahanya pendapatan tidak boleh disamakan dengan yang lain, karena setiap perusahaan mempunyai cara yang berbeda dalam pengakuan dan pencatatan pendapatannya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



7. Pelaporan

© Kiesso dkk (2002:56) mendefinisikan laporan keuangan merupakan cara mengkomunikasikan informasi yang formal dan terstruktur agar bisa ditempatkan dalam bagian utama laporan keuangan suatu item harus memenuhi definisi unsur dasar dapat diukur dengan tingkat kepastian yang memadai dan relevan serta handal.

a) Pendapatan

Menurut SAK ETAP (2.36) Pengakuan pendapatan merupakan akibat langsung dari pengakuan asset dan kewajiban, pendapatan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomis di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan asset atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara handal.

b) Beban

Menurut SAK ETAP (2.37) Pengakuan beban merupakan akibat langsung dari pengakuan asset dan kewajiban, beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi masa depan yang akan berkaitan dengan penurunan asset atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

8. Pengungkapan

Pengungkapan pendapatan menurut SAK ETAP (2013, paragraph 20.28) pengungkapan adalah sebuah proses akuntansi dimana entitas menunjukkan atau mengungkapkan :

- 1) Kebijakan akuntansi yang diterapkan sebagai dasar pengakuan pendapatan yang diterapkan untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi yang melibatkan penyediaan jasa
- 2) Jumlah setiap kategori pendapatan yang diakui selama periode ,termasuk pendapatan yang timbul dari :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- i. Penjualan barang
- ii. Penyediaan jasa
- iii. Bunga
- iv. Royalti
- v. Deviden
- vi. Jenis pendappatan signifikan lainnya.

Pengungkapan Beban Menurut SAK ETAP (2009:123) Pengungkapan beban dalam akuntansi merupakan entitas harus mengungkapkan besarnya biaya pinjaman.

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Penerapan SAK ETAP terhadap entitas Koperasi & UKM diantaranya adalah :

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peniliti , Judul & Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	RO Kawatu, V ilat , A.Wangkar (2019) <i>Variabel : Pengakuan pendapatan ,pengakuan beban SAK ETAP</i>	Deskriptif	Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengakuan pendapatan dan beban KPRI Dinas pendidikan Daerah Sulawesi Utara belum sesuai SAK ETAP ,diharapkan berpedoman SAK ETAP dalam pengakuan dan beban menghasilkan laporan keuangan yang wajar.
	N.R.Avrianty (2015 “ Penerapan pada laporan keuangan simpan pinjam koperasi wanita “Sekarsari dikelurahan tamansari	Deskriptif kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan yang telah dibuat pada koperasi wanita sekarsari terdiri dari laporan sisa hasil usaha dan laporan neraca, perhitungan laporan sisa hasil usaha dan laporan neraca yang disusun oleh koperasi wanita sekarsari belum disusun berdasarkan SAK ETAP menyebabkan adanya perbedaan, maka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta ini milik IBI IKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>C</p>	<p>Variabel : Laporan keuangan,SAK ETAP</p>		<p>dapat disimpulkan bahwa Koperasi wanita sekarsari secara umum belum menerapkan standart akuntansi keuangan yang berlaku umum yaitu SAK ETAP</p>
<p>3</p>	<p>Yohanes juan huvat (2015)”Analisis penerapan SAK ETAP pada Koperasi CU (Credit Union) Daya Lestari di Sanarinda.</p> <p>Variabel : SAK ETAP,Laporan Keuangan</p>	<p>Deskripsi komperatif</p>	<p>Hasil penelitian terutama ditujukan pada pemakai yang diluar perusahaan (Pemakai Ekstern) yang masing – masing mempunyai kepentingan yang berbeda,dari uraian rumusan masalah dan dasar teori yang digunakan maka dapat dikemukakan hipotesisi sebagai berikut “Koperasi CU Daya Lestari telah menetapkan SAK ETAP terhadap laporan keuangan tahun 2015”</p>
<p>4</p>	<p>Arma Yuliza (2013) “Analisis Penerapan SAK ETAP pada Koperasi di Universitas Pasir Pengairan “</p> <p>Variabel :Laporan Keuangan ,SAK ETAP</p>	<p>Deskriptif</p>	<p>Hasil Penelitian dari wawancara yang singkat tersebut para responden juga mengakui bahwasanya mereka tidak memahami SAK ETAP atau bahkan mereka tidak tahu apa itu SAK ETAP tersebut. Hanya ketua koperasi yang dapat memahami tentang SAK ETAP karena ketua koperasi tersebut berlatar belakang pendidikan sarjana Akuntansi. Selain itu mereka juga mengakui pelatihan dan sosialisasi tentang SAK ETAP untuk koperasi sangat dibutuhkan. Dari jawaban kuesioner yang telah diisi hanya sekitar ¼ atau 25% saja yang jawaban responden tersebut yang mengindikasikan bahwa mereka memahami SAK ETAP. Laporan keuangan koperasi UPP disusun bersama-sama yaitu ketua,</p>
<p>5</p>	<p>Yulinartati (2013) “Penerapan SAK ETAP padan Entitas Koperasi (Studi Kasus Pada KUD Tri Karsa Jaya Kec.Bangsalsari ,Kab.Jember)</p> <p>Variabel: Koperasi,Laporan Keuangan,Laporan Laba Rugi</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>Hasil penelitian Penyajian laporan keuangan KUD “Tri Karsa Jaya” belum sesuai dengan SAK-ETAP tentang akuntansi koperasi, karena KUD “Tri Karsa Jaya” belum membuat laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Pada penyajian laporan keuangan neraca dan perhitungan hasil usaha juga masih belum sesuai dengan SAK-ETAP, Pada penyajian laporan keuangan neraca KUD “Tri Karsa Jaya” masih ada yang belum sesuai dengan SAK-ETAP yaitu pada penyajian akun asset dan kewajiban. Untuk ekuitas sudah sesuai dengan SAK-ETAP, Pada penyajian laporan keuangan</p>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>			<p>sis hasil usaha KUD “Tri Karsa Jaya” pada konsep pendapatan dan beban masih belum sesuai dengan SAK-ETAP.</p>
<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>Putri Sukma I (2022) “Analisis Metode Pengakuan Pendapatan dan Beban pada KUD Sumber Alam Jember Periode 2020”</p> <p><i>Variabel : Pengakuan, Pendapatan, Beban, SAK ETAP KUD</i></p>	<p>Deskriptif Evaluative</p>	<p>hasil penelitian menunjukkan bahwa metode pengakuan pendapatan dan beban yang dilakukan pada KUD Sumber Alam Jember periode 2020 telah sesuai dengan SAK ETAP dengan tingkat kesesuaian 72.7% .</p>
<p>Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie</p>	<p>Anggelina Chrisdayanti Salindeho (2018) “Perlakuan Akuntansi Pendapatan Dan Beban Berbasis SAK ETAP dan Implikasinya pada Laporan Keuangan Koperasi Karyawan Karya Sampurna PT. Bank Mandiri</p> <p><i>Variabel : Laporan Keuangan, Pendapatan, Beban</i></p>	<p>Deskriptif</p>	<p>Perlakuan akuntansi atas pendapatan pada Koperasi Karyawan Karya Sampurna PT. Bank Mandiri menggunakan metode accrual basis, dimana pengakuan pendapatan atas pinjaman uang kepada anggota dan non anggota, penjualan barang konsumsi, Bunga Perlakuan akuntansi atas beban pada Koperasi Karyawan Karya Sampurna PT. Bank Mandiri menggunakan metode accrual basis, dimana pengakuan beban gaji, beban THR, beban honor pengurus, beban gaji cleaning service, dan beban lain-lain (Pajak PPh Pasal 21, asuransi, ATM/administrasi, pemakaian/perawatan alat-alat kantor koperasi, dan Bunga PNM) pada Koperasi Karyawan Karya Sampurna diakui menggunakan metode accrual basis. Perlakuan akuntansi atas pendapatan dan beban pada Koperasi Karyawan Karya Sampurna PT. Bank Mandiri sudah sesuai dengan SAK ETAP dilihat dari pengakuan, pengukuran dan pencatatannya. Namun dalam penyajian dan pengungkapannya dalam laporan keuangan belum sesuai dengan SAK ETAP karena pada Koperasi Karyawan Karya Sampurna menggunakan istilah biaya sedangkan SAK ETAP menggunakan istilah beban dan Koperasi Karyawan Karya Sampurna juga tidak membuat Catatan Atas Laporan Keuangan.</p>
	<p>Sutri Handayani (2020) “Analisis Perlakuan Akuntansi atas Pendapatan dan Beban berbasis SAK</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>Hasil penelitian pengakuan pendapatan belum sesuai dengan SAK ETAP, sedangkan untuk pengakuan beban susah sesuai.</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>	<p>ETAP dan Implikasi pada laporan keuangan Koperasi Simpan Pinjam Estu Mulya Sukodasi lamongan “ <i>variabel Perlakuan akuntansi ,pendapatan ,beban</i></p>		
	<p>Hakiki rahmi (2021) “ Analisis Penerapan Akuntansi Koperasi Berdasarkan SAK ETAP “ <i>Variabel: Koperasi Trilogi Mandiri Sejahtera ,Laporan keuangan ,SAK ETAP</i></p>	<p>Kualitatif</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Koperasi Trilogi Mandiri Sejahtera memiliki dua unit usaha yaitu toko,pada laporan keuangan unit simpan pinjam dan unit usaha tokok penyajian laporan keuangan pada tahun 2019 & 2020 telah hampir sesuai dengan SAK ETAP ,namun terdapat beberapa komponen dari laporan keuangan yang ada didalamnya kedua unit usaha koperasi tersebut tidak melakukan transaksi tersebut</p>
<p>© Informatika Kwik Kian Gie</p>	<p>Kadek Arsani¹ (2013) <i>Variabel :Perlakuan akuntansi ,Pendapatan ,Beban</i></p>	<p>Kualitatif</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi pendapatan yang diterapkn KSP Duta Sejahtera belum sesuai SAK ETAP yaitu beban diakuri dengan basis akrual ,sedangkan perlakuan terhadap pendapatan belum sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.</p>

C. Kerangka Pemikiran

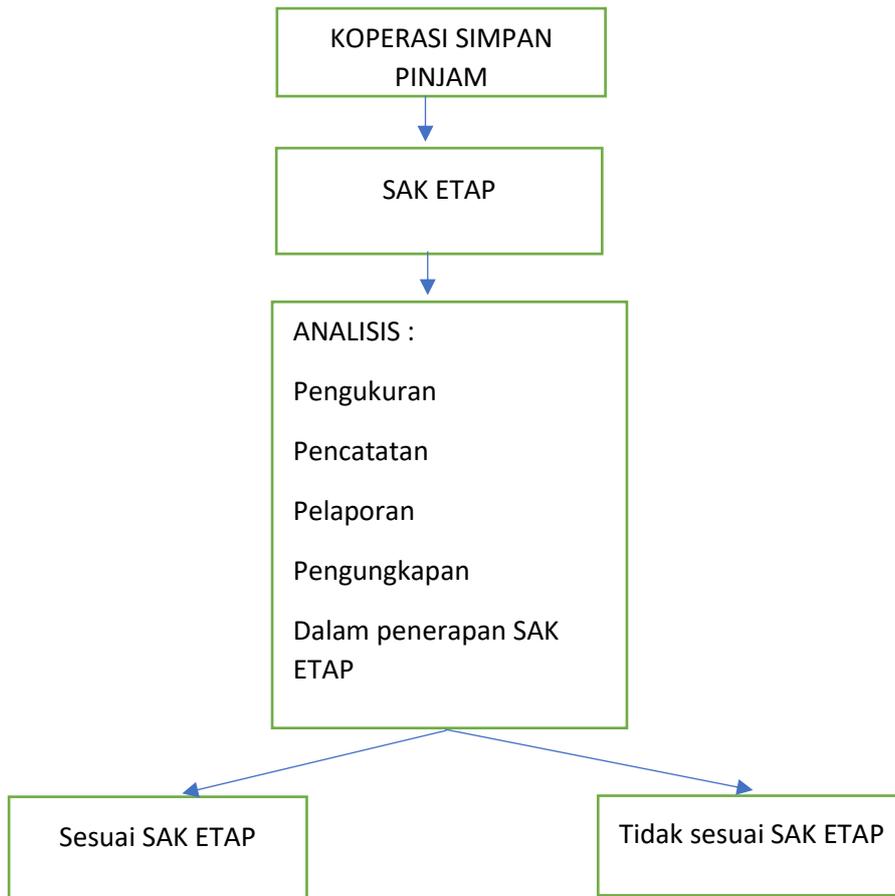
Koperasi Mitra Teladan merupakan koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam. Dengan adanya kegiatan tersebut maka perlu disusun laporan keuangan setiap tahunnya, berupa neraca & laporan laba rugi, Laporan laba rugi diperoleh dari pendapatan bunga atas pinjaman setelah dikurangi penyusutan dan beban-beban . Atas transaksi pendapatan dan beban harus memperhatikan penyusunan dalam pengukuran, pencatatan, pelaporan dan pengungkapan atas transaksi pendapatan & beban harus sesuai SAK ETAP.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berdasarkan uraian yang sudah dipaparkan dalam penjelasan sebelumnya , maka kerangka berpikir dalam penelitian ini dibuat agar penelitian yang peneliti lakukan dapat dilakukan secara terarah dan terperinci. Untuk memudahkan dalam memahami kerangka berpikir peneliti adalah :

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.